



**BUPATI NIAS BARAT
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**KEPUTUSAN BUPATI NIAS BARAT
NOMOR 100.3.3.2- 844 TAHUN 2025**

TENTANG

**PENETAPAN PERUBAHAN STATUS SATUAN PENDIDIKAN
ANAK USIA DINI TK HARAPAN BARU
KABUPATEN NIAS BARAT**

BUPATI NIAS BARAT,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas layanan pendidikan dan meningkatkan kesempatan anak-anak usia dini untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas, perlu melakukan perubahan terhadap Status Satuan Pendidikan anak Usia Dini dari Swasta menjadi Negeri melalui Penegerian;
- b. bahwa berdasarkan surat rekomendasi Tim Verifikasi Penegerian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini di Wilayah Kabupaten Nias Barat Tahun 2025 tanggal 20 November 2025, Status Satuan Pendidikan Anak Usia Dini TK Swasta Harapan Baru Kabupaten Nias Barat telah memenuhi syarat untuk diubah dari Swasta menjadi Negeri;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Bab II bagian B angka 2 huruf e Panduan Penegerian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Cetakan Pertama 2020 yang diterbitkan oleh Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020, Bupati menetapkan perubahan status/penegerian satuan Pendidikan Anak Usia Dini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Perubahan Status Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Tk Harapan Baru Kabupaten Nias Barat;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Barat di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4930);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 4. Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 8 Tahun 2024 tentang Standar Isi pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 169);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Barat Nomor Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nias Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nias Barat Nomor 40);
11. Peraturan Bupati Nias Barat Nomor 25 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nias Barat (Berita Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun 2022 Nomor 25), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Nias Barat Nomor 127 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nias Barat (Berita Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun 2023 Nomor 127);
12. Peraturan Bupati Nias Barat Nomor 35 Tahun 2022 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Penjabaran Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Nias Barat (Berita Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun 2022 Nomor 35), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nias Barat Nomor 72 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nias Barat Nomor 35 Tahun 2022 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Penjabaran Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Nias Barat (Berita Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun 2022 Nomor 72);
13. Keputusan Bupati Nias Barat Nomor 100.3.3.2-296 Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Verifikasi Pencgerian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Di Wilayah Kabupaten Nias Barat Tahun 2025.

MEMUTUSKAN :

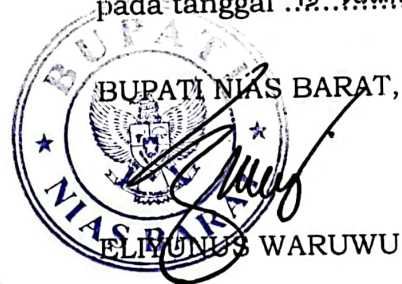
Menetapkan :

KESATU : Mengubah Status Satuan Pendidikan Anak Usia Dini TK Harapan Baru, dengan rincian sebagai berikut:

Status Sebelum Perubahan	Status Setelah Perubahan	Lokasi	Keterangan
Tk Swasta Harapan Baru	Unit Pelaksana Teknis Daerah TK Negeri Harapan Baru	Desa Wango, Kecamatan Lolofitu Moi, Kabupaten Nias Barat	Perubahan Status

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lahomi
pada tanggal 15 Desember 2025



Tembusan :

1. Yth. Gubernur Sumatera Utara di Medan.
2. Inspektur Daerah Kabupaten Nias Barat.
3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Barat.
4. Kepala Satuan Pendidikan Anak Usia Dini TK. Harapan Baru.